
KONSTRUKSI *CIVIC CAMPAIGN* UNTUK KESETARAAN DIFABEL BERBASIS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN TINGGI

Agil Nanggala¹, Karim Suryadi²

Program Doktor Pendidikan Kewarganegaraan, Universitas Pendidikan Indonesia

Abstrak: Riset ini dilakukan untuk merampungkan konstruksi *civic campaign* untuk kesetaraan difabel berbasis pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Riset ini dilakukan berbasis pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur, analisis data yaitu, reduksi, display, dan verifikasi. Hasil riset yaitu, pembelajaran PKn di perguruan tinggi adalah wahana strategis mewujudkan kesetaraan kaum difabel, karena, PKn selaku *civic education* memuat visi, siasat juga praktik dalam memberi pemahaman komprehensif tentang urgensi kesetaraan difabel, potensi dan keunggulan difabel, serta pentingnya *civic campaign* untuk kesetaraan difabel, mengingat selaku bagian integral dari warga negara Indonesia, selanjutnya PKn selaku *citizenship education*, menjadi aksi nyata, integratif, juga kolaboratif berbasis *pentahelix* untuk mengatasi diskriminasi difabel. Kesimpulan yaitu, konstruksi *civic campaign* untuk kesetaraan difabel berbasis pembelajaran PKn di perguruan tinggi, adalah paradigma baru dalam mengatasi diskriminasi difabel yang kompleks, karena inovatif, holistik, partisipatif, integratif, dan kolaboratif, sehingga berbasis PKn atau *integrative*, tidak sebatas kebijakan atau *top down*, maupun sebatas gerakan moral sosial warga negara atau *bottom up*, dengan model implementasi, yaitu, 1) relevansi landasan teoretis, 2) pembagian tugas kerja, 3) validasi dosen pembimbing, 4) peninjauan *pentahelix*, 5) praktik *civic campaign* untuk kesetaraan difabel, dan 6) sosialisasi masif.

Kata Kunci: *Civic Campaign*, Difabel, Kesetaraan, Konstruksi, PKn

Abstract: This research was conducted to complete the construction of a civic campaign for equality for people with disabilities based on civic education learning in universities. This research was carried out based on a qualitative approach using literature study methods, data analysis, namely reduction, display and verification. The results of the research are that Civics learning in higher education is a strategic vehicle for realizing equality for disabled people, because Civics as civic education contains a vision, strategy and practice in providing a comprehensive understanding of the urgency of equality for disabled people, the potential and advantages of disabled people, as well as the importance of civic campaigns for equality of disabled people. , considering it as an integral part of Indonesian citizens, then Civics as citizenship education, becomes a real, integrative and collaborative action based on the pentahelix to overcome discrimination against people with disabilities. The conclusion is that the construction of a civic campaign for equality for disabled people based on Civics learning in higher education is a new paradigm in overcoming complex discrimination against disabled people, because it is innovative, holistic, participatory, integrative and collaborative, so it is based on Civics or integrative, not limited to policy or top down , or limited to a social moral movement of citizens or bottom up, with an implementation model, namely, 1) relevance of theoretical foundations, 2) division of work tasks, 3) validation of supervisors, 4) exploration of the pentahelix, 5) civic campaign practice for equality with disabilities, and 6) massive socialization.

Keywords: Civic Campaign, Disabled, Equality, Construction, Civic Education

Pendahuluan

Eksistensi difabel yang identik dengan diskriminasi, tentu menjadi bukti belum terwujudnya *civic equality* atau keadilan sosial berbasis Pancasila, maka perlu diatasi secara komprehensif, inovatif dan integratif, agar tidak sebatas seremonial. Substansi itu menegaskan urgensi optimalisasi pembelajaran PKn di perguruan tinggi untuk mengatasi diskriminasi difabel, yang mengarah pada *civic campaign* atau kampanye kewarganegaraan yang memuliakan, memberdayakan dan memenuhi hak dasar kaum difabel secara inklusif, kolaboratif, dan berkelanjutan, karena kajian PKn di perguruan tinggi bersifat holistik, modern, dan memuat hak asasi manusia, *civic virtue*, *civic philanthropy*, *civic empowerment*, *citizenship inclusive* juga *civic engagement*, yang relevan untuk mewujudkan *civic campaign* yang memandang penting kaum difabel, untuk mengatasi diskriminasi atau marginalisasi difabel yang klasik dan kompleks. Terlebih pembelajaran PKn yang kapabel direalisasikan, baik selaku *civic education* maupun *citizenship education*, membuat upaya dalam mewujudkan *civic campaign* untuk mengatasi diskriminasi difabel lebih teoretis juga praktis, sehingga holistik, untuk mengarah pada *civic equality*. Eksistensi difabel perlu disertai *civic equality*, pada upaya merealisasikan *civic equality* difabel di Amerika Serikat, yang kompleks, tentu kapabel dilakukan melalui PKn di persekolahan, karena menjadi wahana dalam memberikan pemahaman

komprehensif pada warga negara muda, akan pentingnya kesetaraan, juga penghormatan pada difabel (Bueso, 2022).

Civic campaign yang memuliakan, memberdayakan juga memenuhi hak dasar difabel, yang direalisasikan secara inklusif, bermutu kolaboratif, dan persisten, tentu merepresentasikan mahasiswa selaku warga negara muda yang memiliki *civic virtue*, *civic philanthropy*, *civic competence*, juga *civic engagement* bersifat mumpuni, maka perlu dihabituasikan melalui pembelajaran PKn di perguruan tinggi, yang kontekstual dan komprehensif. Mengingat PKn adalah pembelajaran wajib bagi mahasiswa, yang ditegaskan melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, pada Pasal 35, sehingga perlu dioptimalkan untuk mengatasi diskriminasi difabel, mengingat PKn selaku *civic education* juga *citizenship education*, mampu dalam mewujudkan *civic campaign* yang memuliakan, memberdayakan dan memenuhi hak dasar difabel. PKn di perguruan tinggi adaptif pada kampus merdeka, karena bisa direalisasikan secara kurikuler atau *civic education*, juga secara sosio-kultural atau *citizenship education* untuk memperkuat *civic competence* mahasiswa, juga mengatasi masalah sosial yang kompleks (Nanggala & Suryadi, 2020). Substansi itu menegaskan, pembelajaran PKn di perguruan tinggi bersifat relevan dan utuh untuk mengatasi diskriminasi difabel, dengan melibatkan mahasiswa, sehingga mengarah pada *civic campaign* yang mewujudkan kesetaraan difabel.

Realitas diskriminasi terhadap difabel, sejatinya timbul akibat stereotip *ableisme*, yang memandang difabel adalah cacat, aib, beban, tidak berguna, serta penghambat hidup, sehingga menjadi pandangan subjektif, negatif, juga anomali, maka perlu diatasi melalui pembelajaran PKn pada perguruan tinggi yang memuat kampanye kewarganegaraan atau *civic campaign* untuk kesetaraan difabel atau *civic equality*. Realitas Stereotip *ableisme* bersifat sukar dihilangkan dimasyarakat, termasuk pada dunia kedokteran yang secara ideal harus bersifat profesional juga ilmiah, nyatanya tidak imun pada stereotip *ableisme*, yang memandang difabel adalah aib, cacat juga beban (Janz, 2019). Sejatinya stereotip *ableisme* muncul akibat *individual* atau *medical model of disability*, yang memandang difabel memiliki keterbatasan fisik atau medis, sehingga tidak bisa beraktivitas optimal, akibat keterbatasan yang membuat kaum difabel terdiskriminasi atau termarginalisasi. *Individual* atau *medical model of disability*, adalah teori dalam ilmu medis, yang menegaskan bahwa eksistensi difabel memiliki kekurangan secara fisik atau medis, maka membuat difabel tidak berpotensi untuk berkembang atau hidup mandiri, termasuk menghambat pekerjaan (Barnes dalam Anshari, 2020).

Upaya mewujudkan kesetaraan difabel secara persisten, perlu dilakukan melalui *civic campaign* yang memuliakan, memberdayakan dan memenuhi hak dasar difabel, yang terkomodir pada pembelajaran PKn, mengingat *civic campaign* mencerminkan *civic*

philantrophy, civic engagement, civic movement, civic competence dan *civic virtue* untuk mewujudkan kesetaraan difabel. *Civic campaign* mencerminkan nilai, moral, juga karakter warga negara yang berkompeten, beradab, juga sukarela, untuk mengatasi permasalahan sosial bersifat kompleks, termasuk diskriminasi difabel, yang diinisiasi melalui pembelajaran PKn, dengan melibatkan mahasiswa, termasuk lintas sektor berbasiskan kolaborasi *pentahelix*, mengingat *civic campaign* untuk kesetaraan difabel, melalui pembelajaran PKn di perguruan tinggi, perlu direalisasikan secara komprehensif juga representatif, tidak seremonial. Gerakan kewarganegaraan adalah aksi nyata bersama berbasis kesukarelaan dan moralitas untuk mengatasi persoalan sosial, termasuk masalah lingkungan hidup, gerakan kewarganegaraan perlu diawali oleh kesadaran dan semangat bersama untuk kepentingan masyarakat (Gusmadi & Samsuri, 2019). Realitas PKn di perguruan tinggi yang kapabel dimaknai selaku *civic education*, juga *citizenship education*, adalah modal ilmiah dan modal sosial, untuk mewujudkan *civic campaign* yang memuliakan memberdayakan, serta memenuhi hak dasar difabel secara persisten, maka kajian difabel perlu terakomodasi pada disiplin ilmu dan pembelajaran PKn, sehingga kesetaraan difabel bisa terwujud.

Penelitian terdahulu pada riset ini adalah dari Trevisan (2020), mengenai “Do You Want to Be a Well-Informed Citizen, or Do You Want to Be Sane?” Social Media, Disability, Mental Health, and Political Marginality”, yang mengungkapkan setelah implementasi American Disability Act 1990 di Amerika Serikat, nyatanya kehidupan difabel masih saja terdiskriminasi atau termarginalisasi, akibat realitas sosial, politik, dan ekonomi, yang eksklusif atau sulit diakses, sehingga tidak ramah difabel, permasalahan itu semakin berdampak terhadap difabel menjadi warga negara kelas dua (Trevisan, 2020). *Novelty* riset, yaitu, dirampungkannya suatu konstruksi *civic campaign* untuk kesetaraan difabel berbasiskan pembelajaran PKn di perguruan tinggi. Kontribusi teoretis, yaitu, dikembangkannya *applied theory* mengenai *civic campaign* untuk kesetaraan difabel, yang bisa diwujudkan melalui pembelajaran PKn di perguruan tinggi, lalu kontribusi praktis, yaitu, aksi nyata berupa *civic campaign* atau kampanye kewarganegaraan melalui pembelajaran PKn di perguruan tinggi. Substansi tersebut menegaskan upaya mengatasi diskriminasi difabel, akibat stereotip *ableisme*, berbasis *civic campaign* melalui PKn di perguruan tinggi, adalah paradigma baru yang holistik dan inovatif dalam mengatasi diskriminasi difabel yang kompleks, dan membuat keilmuan dan pembelajaran PKn di perguruan tinggi menjadi semakin kokoh.

Metode

Penelitian ini dirampungkan berbasis pendekatan kualitatif dengan metode studi

literatur, untuk merampungkan konstruksi *civic campaign* untuk kesetaraan difabel berbasis pembelajaran PKn di perguruan tinggi, selaku paradigma baru yang holistik dan inovatif dalam mengatasi diskriminasi difabel yang kompleks. Realitas penelitian kualitatif yang bersifat natural, mendalam, reflektif, dan partisipatif, membuat relevan dengan substansi riset ini, yang berupaya membuktikan bahwa PKn pada perguruan tinggi yang kapabel mewujudkan *civic campaign* untuk kesetaraan difabel, karena riset kualitatif dilakukan secara alamiah, sehingga tidak membuat peneliti bermotif untuk memanipulasi data. Sumber pada riset ini, yaitu, primer, mengarah pada jurnal, karena memiliki nilai keabsahan bersifat tinggi, lalu sekunder, mengarah pada buku dan dokumen, untuk mewujudkan kesimpulan riset yang paling komprehensif, valid dan representatif. Analisis data mengoptimalkan teknik Miles, Huberman & Saldana (2014) yang mengungkapkan analisis data kualitatif, secara gradual, yaitu, reduksi, display, serta verifikasi.

Hasil dan Pembahasan

Eksistensi pembelajaran PKn di perguruan tinggi adalah wahana strategis untuk mewujudkan kesetaraan atau *civic equality* kaum difabel, karena mengkomodir *civic campaign* atau kampanye kewarganegaraan yang mememuliakan, memberdayakan dan memenuhi hak dasar difabel, karena kapabel direalisasikan selaku *civic education* maupun *citizenship education*, sehingga bersifat holistik. Pada konteks disiplin ilmu, PKn memuat kajian Pancasila, hak asasi manusia, *civic equality*, *civic philanthropy*, *civic movement*, *civic competence*, *civic engagement*, *civic culture*, politik, hukum, demokrasi, *civic literacy*, dan *civic empowerment*, maka secara tersurat dan tersirat, disiplin ilmu PKn mampu mewujudkan kesetaraan difabel. Selanjutnya pada konteks kurikulum juga pembelajaran PKn pada perguruan tinggi, tentu bersifat teoretis atau kurikuler, juga bersofat praktis atau sosio-kultural, karena memuat prinsip demokratis, kontekstual, partisipatif, inovatif, inklusif, modern, alturistik, integratif, persisten. holistik dan kolaboratif, tentu bisa dioptimalikan untuk mewujudkan kesetaraan kaum difabel berbasis *civic campaign*, maka representatif. Konsep dan praktik pembelajaran PKn di era modern, adalah terintegrasi dengan *service learning*, untuk menyelesaikan masalah sosial kompleks, memperkuat kemandirian dan kesejahteraan warga negara, lalu membangun kepekaan sosial juga karakter kepemimpinan warga negara muda (Nanggala, 2021).

Pertama, PKn selaku *civic education* merupakan wahana ilmiah strategis dalam mewujudkan *civic campaign* untuk kesetaraan difabel, karena memuat visi, siasat juga praktik dalam memberikan pemahaman holistik mengenai urgensi kesetaraan difabel, potensi dan keunggulan difabel, serta pentingnya *civic campaign* untuk memuliakan,

memberdayakan, dan memenuhi hak dasar difabel, karena selaku bagian integral dari warga negara Indonesia. Mengingat PKn selaku *civic education*, lebih bersifat teoretis atau kurikuler, maka mampu memperkuat *civic competence*, yaitu *civic knowledge*, *civic skills*, dan *civic disposition*, secara transformatif dan ilmiah, untuk *civic equality* difabel, berbasis *civic campaign*, yang disertai pelibatan mahasiswa, karena telah memiliki *civic competence* yang mumpuni. Substansi PKn modern mengakomodir kajian demokrasi, isu sosial, *civic competence* dan kewarganegaraan global, termasuk *civic equality*, maka perlu mengatasi praktik belajar yang menjadikan peserta didik selaku objek pembelajaran, termasuk stagnasi pembelajaran, karena tidak inovatif, sehingga agar mengatasi masalah serius pada perkembangan disiplin ilmu PKn, yang akomodatif dengan pedagogik kritis (Heggart, et al. 2018). Substansi itu membuat PKn di perguruan tinggi selaku *civic education* yang dioptimalkan untuk mewujudkan *civic campaign* untuk kesetaraan difabel, merupakan paradigma baru dalam mengatasi diskriminasi difabel yang kompleks, berbasis pelibatan warga negara, termasuk untuk mengembangkan keilmuan PKn agar semakin komprehensif dan modern.

Kedua, PKn selaku *citizenship education*, adalah wahana ilmiah strategis dalam mewujudkan *civic campaign* untuk kesetaraan difabel, karena menjadi aksi nyata, integratif, juga kolaboratif dalam memuliakan, memberdayakan dan memenuhi hak dasar difabel, selaku praktik *civic campaign* untuk kesetaraan difabel. Mengingat *citizenship education* memuat visi, konsep dan aksi nyata untuk *civic campaign* dalam mewujudkan kesetaraan difabel, dengan melibatkan mahasiswa, terlebih konsep *civic campaign* untuk kesetaraan difabel, tidak akan pernah terwujud tanpa aksi nyata, integratif dan kolaboratif melalui pembelajaran PKn di perguruan tinggi yang bersifat praktis dimasyarakat atau *citizenship education*. PKn selaku *citizenship education*, adalah praktik pembelajaran PKn bersifat langsung dimasyarakat, untuk mengatasi persoalan sosial, memberdayakan masyarakat, juga memperkuat *civic competence* mahasiswa, dengan melibatkan lintas sektor, termasuk relevan dengan konsep kampus merdeka (Nanggala & Suryadi, 2022). Substansi itu membuat realisasi PKn selaku *citizenship education*, untuk *civic campaign* atas kesetaraan difabel, mencerminkan *civic philanthropy*, *civic virtue*, *civic engagement*, dan *civic competence* mahasiswa dan lintas sektor, karena secara sukarela, untuk memuliakan, memberdayakan, juga memenuhi hak dasar difabel, mengingat *civic campaign*, mengakomodir gerakan kewarganegaraan berbasis moralitas yang bersifat inklusif, bermutu dan persisten atau berkelanjutan.

Realitas pembelajaran PKn di perguruan tinggi yang kapabel dimaknai selaku *civic education*, maupun *citizenship education*, membuat upaya merealisasikan *civic campaign* untuk kesetaraan difabel menjadi semakin holistik, representatif, integratif dan relevan, karena tidak sebatas teoretis, tetapi juga praktis. Mengingat eksistensi PKn selaku *civic education* memberikan kajian akademik, strategi ilmiah dan landasan teori relevan mengenai urgensi mewujudkan *civic campaign* untuk kesetaraan atau *civic equality* difabel, lalu PKn selaku *citizenship education*, menjadi aksi nyata juga upaya integratif serta kolaboratif dalam mewujudkan *civic equality* difabel, selaku praktik *civic campaign* yang

memuliakan, memberdayakan, dan memenuhi hak dasar difabel secara inklusif juga berkelanjutan. PKn bersifat komprehensif, karena kapabel dimaknai selaku *civic education*, yaitu, PKn pembelajaran formal, maupun selaku *citizenship education*, yaitu PKn pembelajaran non-formal, untuk mewujudkan suatu peradaban bangsa bersifat maju atau *civil society* (Winataputra, 2016). Substansi itu menegaskan PKn pada perguruan tinggi mampu mewujudkan *civic campaign* untuk kesetaraan difabel, berbasis *civic philanthropy*, *civic engagement*, *civic competence* dan *civic virtue*, untuk keadilan sosial.

Mengingat konstruksi *civic campaign* atau kampanye kewarganegaraan untuk kesetaraan difabel berbasis pembelajaran PKn di perguruan tinggi, baik selaku *civic education* maupun *citizenship education*, mengakomodir model kolaborasi *pentahelix*, karena melibatkan setiap sektor atau unsur, yaitu, pemerintah, akademisi, komunitas atau masyarakat, swasta, juga media, agar mampu mewujudkan *civic equality* difabel secara nyata. Terlebih *civic campaign* atau kampanye kewarganegaraan untuk *civic equality* atau kesetaraan difabel, mencerminkan moralitas publik, dan spirit bersama yang secara sadar juga sukarela untuk memuliakan, memberdayakan, dan memenuhi hak dasar difabel, selaku bagian intergal dari warga negara Indonesia. Kolaborasi *pentahelix* adalah wahana strategis untuk melibatkan setiap sektor untuk mengatasi problematik sosial yang kompleks, lalu memberdayakan masyarakat secara persisten, serta membudayakan nilai-nilai Pancasila pada warga negara muda untuk peradaban Indonesia yang unggul (Nanggala, 2023). Substansi itu menegaskan, realisasi *civic campaign* untuk kesetaraan difabel, bersifat komprehensif juga representatif, karena mengakomodir model kolaborasi *pentahelix*, sehingga melibatkan lintas sektor, untuk konstruksi *civic campaign* untuk kesetaraan difabel berbasis pembelajaran PKn di perguruan tinggi yang lebih efektif dan efisien.

Konstruksi *civic campaign* untuk kesetaraan difabel berbasis pembelajaran PKn di perguruan tinggi, menekankan urgensi *civic philanthropy*, *civic engagement*, *civic virtue* dan *civic competence*, selaku modal sosial untuk memuliakan, memberdayakan, dan memenuhi hak dasar difabel, karena menjadi upaya preventif sukarela, untuk *civic equality* difabel atau kemanusiaan. Mengingat praktik pembelajaran PKn pada perguruan tinggi dalam merealisasikan *civic campaign* untuk *civic equality* difabel, kapabel dilakukan secara utuh, yaitu, berbasis *civic education*, maupun *citizenship education*, sebagai upaya ilmiah dalam mengatasi praktik pembelajaran PKn yang sebatas seremonial, sehingga tidak bermanfaat positif, baik untuk kesetaraan difabel, maupun penguatan *civic competence* mahasiswa berbasis *civic campaign*. Konsep dan praktik pembelajaran PKn di perguruan tinggi perlu bersifat modern dan menjadikan realitas, persoalan serta fenomena sosial sebagai kajian pembelajaran PKn, supaya mahasiswa memiliki kepekaan sosial serta sikap ilmiah pada persoalan sosial, maka menjadi representasi timbulnya demokrasi dan keterlibatan pada pembelajaran PKn (Hidayat, et al. 2019). Substansi itu menegaskan, konstruksi *civic campaign* untuk kesetaraan difabel berbasis pembelajaran PKn di perguruan tinggi, membuat disiplin ilmu dan

pembelajaran PKn pada perguruan tinggi lebih komprehensif, demokratis, kontekstual, modern, dan partisipatif, karena mengakomodir persoalan sosial, yaitu, diskriminasi kaum difabel.

Terlebih konstruksi *civic campaign* untuk kesetaraan atau *civic equality* difabel berbasis pembelajaran PKn di perguruan tinggi, tidak hanya mengakomodir orientasi kesetaraan difabel, yang memuat pemuliaan, pemberdayaan, serta pemenuhan hak dasar difabel, tetapi juga memperkuat *civic competence* mahasiswa. Mengingat PKn selaku *civic education*, maupun *citizenship education*, menekankan urgensi pelibatan mahasiswa, dalam memuliakan, memberdayakan, dan memenuhi hak dasar difabel, selaku praktik *civic campaign* untuk kesetaraan difabel, karena mahasiswa dilatih kapasitas wawasan, karakter, dan keterampilan, untuk mengatasi diskriminasi difabel yang kompleks, lalu turut melakukan komunikasi persuasif atau mengajak lintas sektor secara *pentahelix* untuk *civic equality* kaum difabel, sehingga kapasitas *civic competence* mahasiswa. *Civic competence* atau kompetensi kewarganegaraan, yaitu, *civic knowlegde*, *civic skills*, juga *civic disposition*, adalah indikator warga negara yang cerdas juga baik, maka perlu konsisten dihabituasikan pada setiap warga negara secara inklusif (Branson dalam Lonto, 2019). Substansi itu menegaskan konstruksi *civic campaign* untuk kesetaraan difabel berbasis pembelajaran PKn pada perguruan tinggi, tidak hanya berfokus pada visi strategis, yaitu, kesetaraan difabel, tetapi juga mengakomodir penguatan *civic competence* mahasiswa, selaku warga negara muda, untuk *civil society* Indonesia berbasis nilai-nilai Pancasila.

Konstruksi *civic campaign* untuk kesetaraan difabel berbasis pembelajaran PKn di perguruan tinggi, tidak sebatas upaya ilmiah dalam memuliakan, memberdayakan dan memenuhi hak dasar difabel, yang mengarah pada *civic equality* difabel, karena turut menjadi upaya kemanusiaan, berbasis *civic philanthropy*, *civic engagement*, *civic virtue*, dan *civic competence*, sehingga memuat kesadaran dan kesukarelaan warga negara secara holistik, integratif, juga kolaboratif dalam mewujudkan *civic campaign* untuk kesetaraan difabel. Mengingat konsep dan praktik *civic camapaign* untuk kesetaraan difabel, selain perlu dianalisis potensi dan relevansinya melalui disiplin ilmu dan pembelajaran PKn, tentu juga harus disertai spirit moral, karakter kesukarelaan, kepekaan sosial, yang mengarah pada *civic competence*, *civic virtue*, *civic philanthropy*, dan *civic engagement*, agar *civic campaign* untuk kesetaraan kaum difabel, bersifat inklusif dan berkelanjutan. Gerakan kewarganegaraan agar bersifat konsisten, perlu disertai keadaban dan keterlibatan warga negara, karena didasarkan pada kesadaran tanpa paksaan, untuk kepentingan bersama, termasuk pada masalah lingkungan (Silfiana & Samsuri, 2019). Substansi itu menegaskan pembelajaran PKn pada perguruan tinggi dalam mewujudkan *civic campaign* untuk kesetaraan difabel, tidak sebatas kajian ilmiah atau penelitian sosial untuk memperkokoh disiplin ilmu PKn, tetapi juga untuk secara nyata dalam mewujudkan kesetaraan difabel, melalui *civic campaign* secara inklusif dan berkelanjutan.

Realitas diskriminasi difabel yang terjadi lintas waktu dan lintas generasi, tentu menegaskan bahwa diskriminasi difabel adalah permasalahan sosial bersifat klasik, dinamis juga kompleks, maka siasat dan upaya mengatasi masalah diskriminasi atau marjinalisasi difabel, perlu bersifat inovatif, holistik, integratif, serta representatif. Siasat dan upaya yang dipandang baru dan transformatif itu, tentu kapabel dilakukan melalui PKn pada perguruan tinggi, baik selaku *civic education*, maupun *citizenship education*, dalam mewujudkan *civic campaign* untuk kesetaraan difabel. Mengingat tidak hanya *top down* atau kebijakan pemerintah, juga *bottom up* atau gerakan moral sosial masyarakat, tetapi *integrative* atau berbasis PKn, sehingga memenuhi syarat menjadi paradigma baru dalam mewujudkan kesetaraan difabel, berbasis kampanye kewarganegaraan atau *civic campaign*, sehingga inklusif terhadap difabel. *Inclusive citizenship* yaitu pandangan kewarganegaraan bersifat inklusif, dengan mengakomodir skarakter inklusif, demokratis, toleran, juga setara pada praktik kewarganegaraan, untuk mengatasi masalah diskriminasi berbasis ras, etnis, maupun agama (Walker & Barcham, 2010).

Konstruksi *civic campaign* untuk kesetaraan difabel berbasis pembelajaran PKn pada perguruan tinggi, adalah paradigma baru dalam mengatasi diskriminasi difabel yang bersifat kompleks, karena bersifat inovatif, holistik, partisipatif, integratif, dan kolaboratif, sehingga berbasis PKn atau *integrative*, tidak sebatas kebijakan atau *top down*, maupun sebatas gerakan moral sosial warga negara atau *bottom up*. Mengingat *civic campaign* atau kampanye kewarganegaraan untuk kesetaraan difabel kapabel diwujudkan melalui pembelajaran PKn di perguruan tinggi, karena bisa direalisasikan selaku *civic education*, yaitu, PKn pembelajaran teoretis atau kurikuler, juga selaku *citizenship education*, yaitu PKn pembelajaran praktis atau sosio-kultural, sehingga mengarah pada *civic campaign* untuk kesetaraan difabel. Kesetaraan difabel perlu dipandang penting oleh setiap warga negara, pada upaya mewujudkan kesetaraan difabel di Amerika Serikat, dilaksanakan melalui reformasi kebijakan, dan pelibatan warga negara, sehingga kaum difabel bisa berkembang selaras dengan preferensinya (Voulgarides, 2021). Berbasis informasi argumentatif itu, ditegaskan, konstruksi *civic campaign* untuk kesetaraan difabel berbasis pembelajaran PKn pada perguruan tinggi, mengarah pada: 1) relevansi landasan teoretis, 2) pembagian tugas kerja, 3) validasi dosen pembimbing, 4) penjajakan kolaborasi *pentahelix*, 5) praktik *civic campaign* untuk kesetaraan difabel, dan 6) sosialisasi masif.

Kesimpulan

Eksistensi pembelajaran PKn di perguruan tinggi adalah wahana strategis untuk mewujudkan kesetaraan atau *civic equality* kaum difabel, karena mengakomodir *civic campaign* atau kampanye kewarganegaraan yang mememuliakan, memberdayakan dan memenuhi hak dasar difabel, karena kapabel direalisasikan selaku *civic education*

maupun *citizenship education*, sehingga bersifat holistik. PKn selaku *civic education* memuat visi, siasat juga praktik dalam memberi pemahaman holistik tentang urgensi kesetaraan difabel, potensi dan keunggulan difabel, serta pentingnya *civic campaign* untuk kesetaraan difabel karena selaku bagian integral dari warga negara Indonesia. Selanjutnya PKn selaku *citizenship education*, menjadi aksi nyata, integratif, juga kolaboratif berbasis *pentahelix* untuk mengatasi diskriminasi difabel. Konstruksi *civic campaign* untuk kesetaraan difabel berbasis pembelajaran PKn pada perguruan tinggi, adalah paradigma baru dalam mengatasi diskriminasi difabel yang kompleks, karena inovatif, holistik, partisipatif, integratif, dan kolaboratif, sehingga berbasis PKn atau *integrative*, tidak sebatas kebijakan atau *top down*, maupun sebatas gerakan moral sosial warga negara atau *bottom up*, dengan model implementasi yaitu, 1) relevansi landasan teoretis, 2) pembagian tugas pokok kerja, 3) validasi dosen pembimbing, 4) penjajakan kolaborasi *pentahelix*, 5) praktik *civic campaign* untuk kesetaraan difabel, dan 6) sosialisasi masif.

Daftar Pustaka

- Anshari, M. (2020). Teori Disabilitas: Sebuah Review Literatur. *Modernity: Jurnal Pendidikan dan Islam Kontemporer*, 1(1), 35-40.
- Bueso, L. (2022). Civic Equity for Students With Disabilities. *Teachers College Record*, 124(1), 62-86. <https://doi.org/10.1177/01614681221086092>
- Gusmadi, S., & Samsuri. (2019). Gerakan Kewarganegaraan Ekologis sebagai upaya Pembentukan Karakter Peduli Lingkungan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(2), 381-392. <http://dx.doi.org/10.17977/um019v4i2p381-391>
- Heggart, K., Flowers, R., Burrridge, N., & Arvanitakis, J. (2018). Refreshing Critical Pedagogy and Citizenship Education through the Lens of Justice and Complexity Pedagogy. *Global Studies of Childhood*, 8(4), 355-367. <https://doi.org/10.1177/2043610618814846>
- Hidayat, H., Mulyani, H., Nurhidayat, F., Irmayani., & Sonia, N. (2019). Meningkatkan Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Menggunakan *Contextual Teaching Learning* di Kelas Rendah. *Pionir: Jurnal Pendidikan*, 8(2), 169-184. <http://dx.doi.org/10.22373/pjp.v8i2.6235>
- Janz, H. L. (2019). Ableism: The Undiagnosed Malady Afflicting Medicine. *CMAJ: Canadian Medical Association journal= journal de l'Association Medicale Canadienne*, 191(17), E478-E479. <https://doi.org/10.1503/cmaj.180903>
- Lonto, A. L. (2019). Students' Civic Disposition through Learning Civics and

- Pedagogical Competences of High School Teachers. *Universal Journal of Educational Research*, 7(12), 35-41. <https://doi.org.10.13189/ujer.2019.071905>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Nanggala, A. (2021). Analisis Konsep *Service Learning* dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan. *PKn Progresif*, 16(1), 1-14.
- Nanggala, A. (2023). Model Pembudayaan Pancasila Berbasis Kolaborasi Pentahelix untuk Membangun Generasi Muda Indonesia yang Pancasilais. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 3(2), 160-178. <https://doi.org/10.52738/pjk.v3i2.166>
- Nanggala, A., & Suryadi, K. (2020). Analisis Konsep Kampus Merdeka dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Global Citizen*, 9(2), 10-23. <https://doi.org/10.33061/jgz.v9i2.4545>
- Nanggala, A., & Suryadi, K. (2022). Realisasi Citizenship Education melalui Kampus Merdeka. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 7(1), 68-76. <http://dx.doi.org/10.17977/um019v7i1p68-76>
- Silfiana, L., & Samsuri. (2019). Keterlibatan Warga Negara Muda dalam Gerakan Kewarganegaraan Ekologis untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan. *Jurnal Studi Pemuda*, 8(2), 127-139. <https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.48180>
- Trevisan, F. (2020). "Do You Want to Be a Well-Informed Citizen, or Do You Want to Be Sane?" *Social Media, Disability, Mental Health, and Political Marginality. Social Media + Society*, 6(1). <https://doi.org/10.1177/2056305120913909>
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- Voulgarides, C. K. (2021). Politics of Empowerment: Disability Rights and the Cycle of American Policy Reform. *Contemporary Sociology*, 50(1), 82-83. <https://doi.org/10.1177/0094306120976390ee>
- Walker, R., & Barcham, M. (2010). Indigenous-Inclusive Citizenship: The City and Social Housing in Canada, New Zealand, and Australia. *Environment and Planning A: Economy and Space*, 42(2), 314-331. <https://doi.org/10.1068/a41314>
- Winataputra, U. S. (2016). Posisi Akademik Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dan Muatan/Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dalam Konteks Sistem Pendidikan Nasional. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 1(1), 15-36. doi: <https://doi.org/10.21067/jmk.v1i1.1184>